

TESIS

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**



Oleh

MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA
NIM. 2420215310003

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**MUHAMMAD RIZKY SAPUTRA
NIM. 2420215310003**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

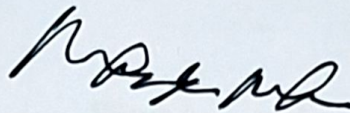
**Judul Tesis : PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TAPIN PERIODE 2024-2029 DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH**

Nama : Muhammad Rizky Saputra

NIM : 2420215310003

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

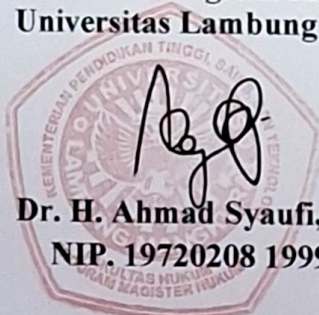
Pembimbing



**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002**

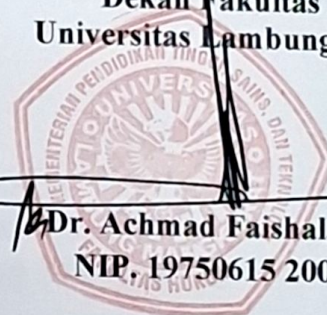
Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



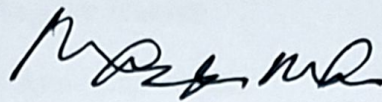

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

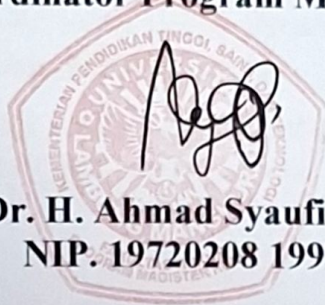
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



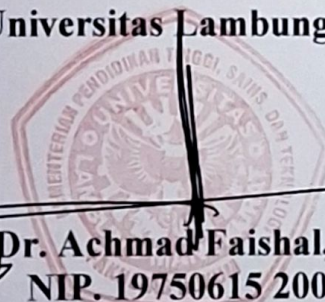
**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**

**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizky Saputra

NIM : 2420215310003

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 02 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rizky Saputra

NIM. 2420215310003

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. (Pembimbing)

MOTTO

"Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. *Al-Mujadilah* : 11)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya, karya ilmiah ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih yang tulus kepada :

Kedua orang tua tercinta, yang telah membesarkan, mendidik, dan mengiringi setiap langkah kehidupan penulis dengan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tiada henti. Segala pencapaian yang diraih hingga saat ini tidak terlepas dari ketulusan cinta dan keikhlasan yang selalu diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak Sersan Mayor (Purn) H. Abdul Muin dan Ibu Hj. Nurhayati, S.Pd.I. serta kaka kandung Ibu Insa Fitria Ulfa, S.Pd.

Istriku tercinta, dr. Puteri Wahyu Safitri, M.H (Kes), terima kasih atas cinta, kesabaran, doa, pengertian, dan dukungan yang tidak pernah berhenti selama perjalanan studi ini. Kehadiranmu menjadi sumber kekuatan, semangat, dan ketenangan dalam setiap proses yang penulis jalani.

Putraku tersayang, Muhammad Raffasya Alfarizqi, engkau lah anugerah terindah sekaligus penyemangat terbesar dalam setiap langkah perjuangan. Semoga setiap ikhtiar dan pencapaian ini kelak menjadi teladan serta bekal untuk masa depanmu yang lebih baik.

Terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, guru, dosen, dan semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, serta motivasi hingga tesis ini dapat diselesaikan.

Semoga karya sederhana ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara dan pemerintahan daerah, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaiannya.

"Tiada keberhasilan tanpa doa, perjuangan, dan ridha dari orang-orang yang kita cintai."

SAPUTRA, MUHAMMAD RIZKY. 2026. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.,** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** dan **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** 114 halaman.

RINGKASAN

Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai salah satu fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fungsi legislasi memiliki kedudukan penting karena menjadi instrumen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui pembentukan Peraturan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Secara normatif, DPRD memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari hak prakarsa DPRD dibandingkan dengan usulan dari pihak eksekutif. Pada periode penelitian tahun 2024–2025, kontribusi DPRD dalam menghasilkan Peraturan Daerah masih relatif rendah dan cenderung didominasi oleh usulan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara penguatan fungsi legislasi DPRD secara normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapin. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori otonomi daerah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 secara normatif telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan Peraturan Daerah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan fungsi legislasi belum berjalan secara optimal. Dominasi usulan Rancangan Peraturan Daerah dari pihak eksekutif, terhambatnya Ranperda prakarsa DPRD pada tahap

harmonisasi, serta belum optimalnya pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) menunjukkan bahwa DPRD belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi legislasinya secara efektif.

Penelitian ini juga menemukan bahwa belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, perbedaan latar belakang pendidikan, minimnya pengalaman legislatif, belum memadainya dukungan tenaga ahli pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), serta lemahnya komunikasi politik DPRD dalam mendorong partisipasi masyarakat pada proses pembentukan Peraturan Daerah. Akibatnya, aspirasi masyarakat belum terakomodasi secara optimal dalam proses legislasi daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 belum berjalan secara optimal meskipun telah dilaksanakan sesuai kerangka normatif yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas anggota DPRD, optimalisasi peran Bapemperda, peningkatan dukungan tenaga ahli, serta penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Upaya tersebut diperlukan agar DPRD mampu menjalankan fungsi legislasinya secara efektif dan menghasilkan Peraturan Daerah yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tapin.

SAPUTRA, MUHAMMAD RIZKY. 2026. PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.,** dan Pembimbing Pendamping : **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** dan **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** 114 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin Periode 2024–2029 dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan fungsi legislasi tersebut belum berjalan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tapin. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan teori negara hukum, teori kewenangan, dan teori otonomi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Tapin secara normatif telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Peraturan Daerah. Namun dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasi di lapangan. Dominasi usulan Rancangan Peraturan Daerah dari pihak eksekutif, terhambatnya Ranperda prakarsa DPRD pada tahap harmonisasi, serta belum optimalnya pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah menyebabkan fungsi legislasi DPRD belum berjalan secara efektif. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia anggota DPRD, minimnya pengalaman legislatif, kurangnya dukungan tenaga ahli, serta lemahnya komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, optimalisasi peran Bapemperda, peningkatan dukungan tenaga ahli, dan penguatan partisipasi masyarakat agar fungsi legislasi DPRD dapat berjalan lebih efektif dalam menghasilkan Peraturan Daerah yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SAPUTRA, M. R. 2026. THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATIVE FUNCTION OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF TAPIN REGENCY FOR THE 2024–2029 PERIOD IN THE FORMATION OF REGIONAL REGULATIONS. Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor : **Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.,** and Co-Supervisors : **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. and Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** 114 Pages.

ABSTRACT

Keywords : Legislative Function, Regional House of Representatives, Regional Regulation.

This study aims to analyze the implementation of the legislative function of the Regional House of Representatives (DPRD) of Tapin Regency for the 2024–2029 period in the formation of Regional Regulations and to identify the factors that hinder the optimal implementation of such legislative function.

This research employs an empirical juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research, document analysis, and interviews with parties involved in the process of drafting Regional Regulations in Tapin Regency. The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theories of the rule of law, authority, and regional autonomy.

The results show that the legislative function of the Regional House of Representatives of Tapin Regency has normatively been carried out in accordance with the prevailing laws and regulations governing the formation of Regional Regulations. However, in practice, there remains a gap between normative provisions and their implementation. The dominance of executive-initiated draft regulations, the obstruction of DPRD-initiated draft regulations during the harmonization process, and the suboptimal implementation of the Regional Legislative Program have resulted in the legislative function not being carried out effectively. Furthermore, the ineffective implementation of the legislative function is influenced by limited human resource capacity among DPRD members, inadequate legislative experience, insufficient support from legal experts, and weak political communication and public participation in the legislative process. Therefore, strengthening the institutional capacity of the Regional House of Representatives, optimizing the role of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda), improving expert support, and enhancing public participation are necessary to ensure a more effective legislative function in producing responsive and high-quality Regional Regulations.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin Periode 2024-2029 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah" dengan lancar dan baik.

Selama dalam proses pengerjaan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya tesis ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya tesis ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum, atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing, yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama pengerjaan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. selaku Penguji, yang telah memberikan kritik, saran, dan arahan yang sangat berarti, yang menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
4. Seluruh Staf Akademik, karyawan, dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang dengan tulus membantu setiap proses administrasi dan menjadi bagian penting dari kelancaran studi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu yang tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir penulis dalam memandang hukum dan kehidupan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
a. Tujuan Penelitian	9
b. Kegunaan Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Kerangka Teoritis	11
a. Teori Negara Hukum	11
b. Teori Kewenangan	27
c. Teori Otonomi Daerah	32
d. Teori Efektivitas.....	42
e. Teori Perilaku.....	47
2. Kerangka Konseptual.....	52
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52
F. Metode Penelitian	63
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	66

BAB II	PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024–2029 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	68
	A. Deskripsi Umum DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024-2029.....	68
	B. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin	73
	C. Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024-2029.....	92
BAB III	PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN TAPIN PERIODE 2024-2029 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BELUM BERJALAN SECARA OPTIMAL.....	96
	A. Kondisi Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024-2029	96
	B. Pengalaman Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Tapin Periode 2024-2029 dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi	102
	C. Lemahnya Komunikasi Politik DPRD Kabupaten Tapin dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pembentukan Peraturan Daerah	106
BAB IV	PENUTUP.....	109
	A. Kesimpulan.....	109
	B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP